

IMPOR PANGAN NEGERI AGRARIS

Angan-Angan Kedaulatan Pangan



Impor Pangan Negeri Agraris

Yusuf Wibisono, Anita

Pemerintahan Jokowi-JK tampil menjanjikan ke tampuk kekuasaan dengan kedaulatan pangan sebagai salah satu program utamanya. Dengan visi menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045, pemerintah menargetkan swasembada beras, bawang merah dan cabai pada 2016, jagung pada 2017, gula konsumsi pada 2019, kedelai pada 2020, gula industri pada 2025, daging sapi pada 2026 dan bawang putih pada 2033. Bahkan target tidak berhenti pada swasembada, namun meraih surplus produksi yang signifikan sehingga Indonesia akan mampu mengekspor komoditas pangan strategis dan menyandang gelar lumbung pangan dunia pada 2045. Dari importir, menjadi eksportir.

Dengan dukungan anggaran kedaulatan pangan di kisaran Rp 100 triliun setiap tahunnya, sejumlah inisiatif baru dilakukan pemerintah untuk mencapai kemandirian pangan sebagai amanat utama RPJMN 2015-2019, mulai dari perbaikan jaringan irigasi, bantuan alat dan mesin pertanian, asuransi pertanian, pembangunan embung, lumbung pangan perbatasan, dan Toko Tani Indonesia, pengembangan benih unggul, revitalisasi pabrik gula, hingga integrasi jagung-sawit, sapi indukan wajib bunting dan kawasan rumah pangan lestari.

Namun hingga kini memasuki tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK, impor pangan masih membanjiri negeri, bahkan semakin deras. Sepanjang 2018, impor Indonesia untuk 9 komoditas pangan utama, yaitu beras, jagung, kedelai, gandum, gula, garam, bawang putih, daging sapi dan susu, mencapai 24,77 juta ton senilai US\$ 9,06 miliar. Angka ini meningkat dari kondisi 2014, dimana impor untuk 9 komoditas pangan utama saat itu “hanya” 19,72 juta ton senilai US\$ 8,54 miliar.

Swasembada dan Kemandirian Pangan

Ketergantungan pada pasar pangan global untuk negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, adalah sangat beresiko tinggi, tidak hanya dari fluktuasi harga namun juga ketersediaan pasokannya. Krisis pangan global pada awal 2008 yang terjadi secara tidak terduga, dimana persediaan pangan di pasar global menipis dengan cepat dan harga melonjak tinggi, memberi pelajaran penting terutama bagi negara dengan penduduk besar seperti Indonesia.

Banjir impor pangan adalah ironi besar bagi negeri agraris seperti Indonesia. Dengan bentang alam yang sangat luas hingga 191 juta hektar, tanah yang subur, iklim yang relatif terduga dengan sinar matahari yang berlimpah dan curah hujan yang tinggi, serta besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, kedaulatan dan kemandirian pangan seharusnya bukanlah impian bagi negeri

Dengan bentang alam yang sangat luas hingga 191 juta hektar ... kedaulatan dan kemandirian pangan seharusnya bukanlah impian

IMPOR PANGGAN NEGERI AGRARIS

Impor 9 Komoditas Pangan Utama Indonesia, 2018



TOTAL IMPOR
9 KOMODITAS

24,77 Juta Ton

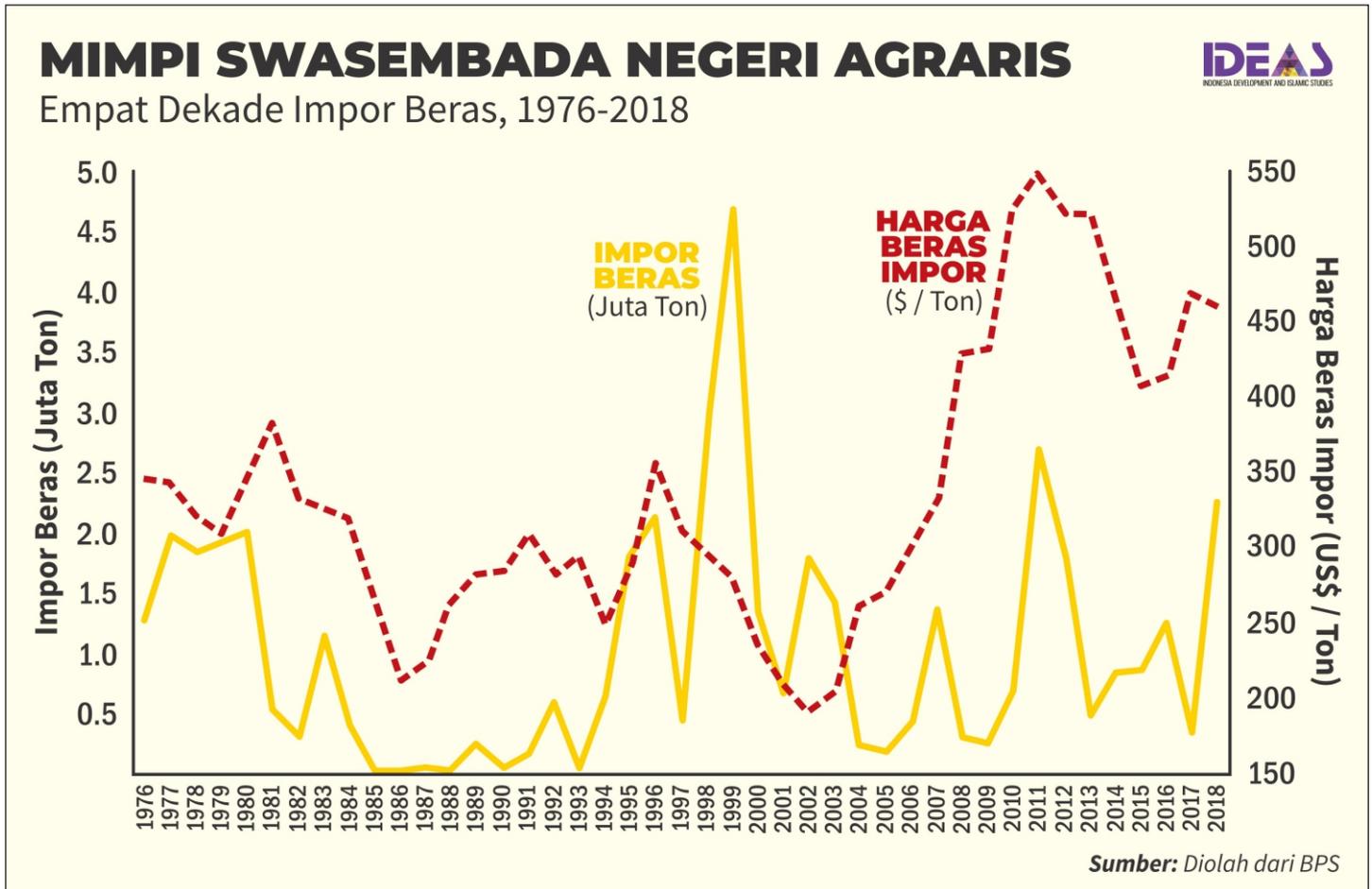
9,06 US\$ Miliar



zamrud khatulistiwa ini.

Ketersediaan pangan yang memadai, baik secara kuantitas, mutu, keamanan, kandungan gizi, terdistribusi secara merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan, menjadi fondasi kokoh bagi masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Karena itu maka kondisi rawan pangan dan gizi pada individu dan bahkan kelangkaan pangan di masyarakat harus dipandang sebagai salah satu ancaman besar bagi keamanan nasional.

... kelangkaan pangan dipandang sebagai salah satu ancaman besar bagi keamanan nasional.



Rezim orde baru menjadikan ketersediaan pangan, peningkatan produksi pertanian dan menekan harga input pertanian sebagai kebijakan utama di awal pemerintahannya. Indonesia tercatat kemudian mampu swasembada pangan pada era 1980-an, setelah adopsi revolusi hijau (*green revolution*) pada 1970-an. Di sepanjang 1980-an, impor beras menurun drastis dengan puncaknya pada 1986, hanya sekitar 28 ribu ton.

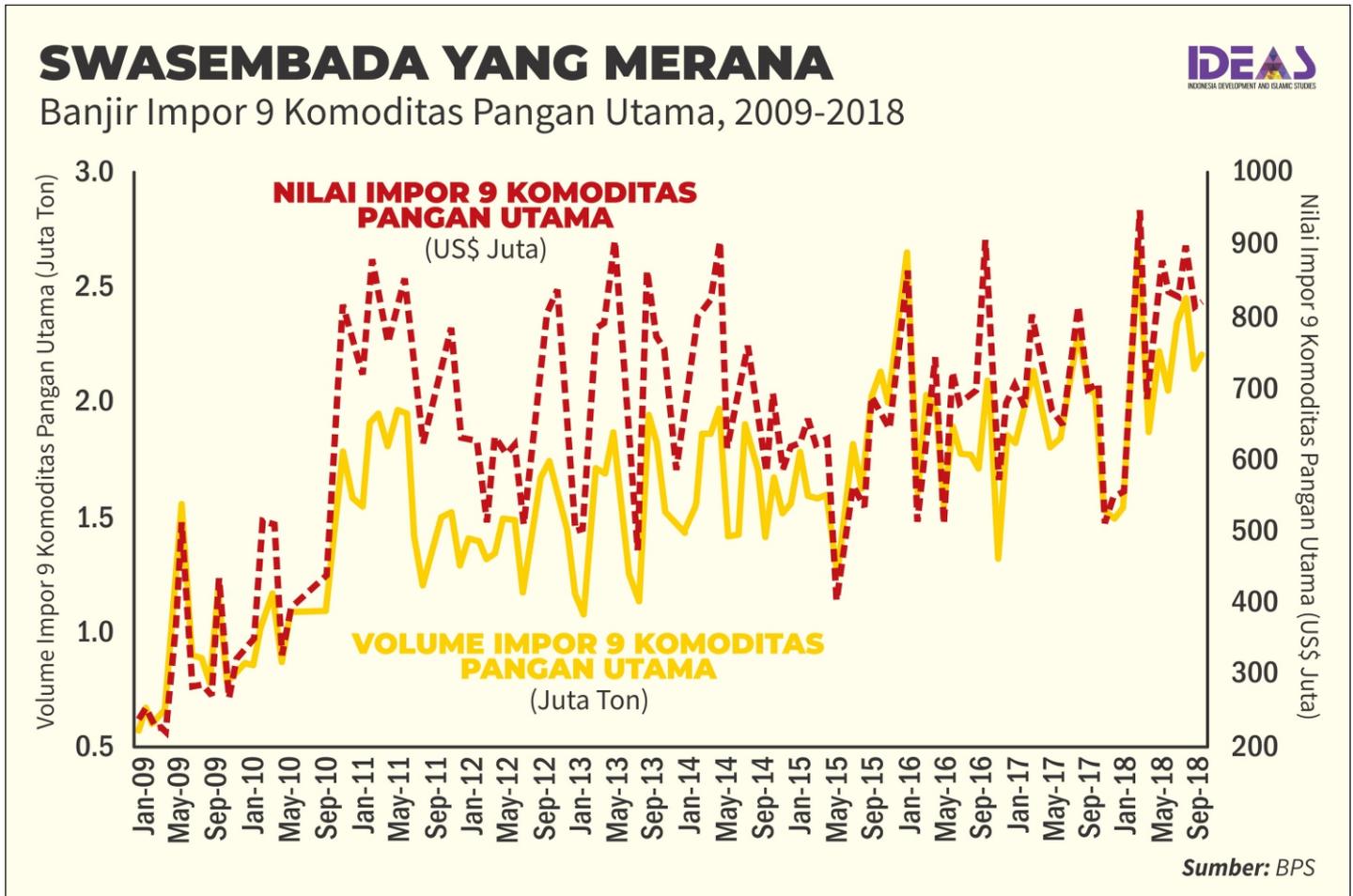
Indonesia tercatat swasembada pangan pada era 1980-an. impor beras menurun drastis pada 1986 sekitar 28 ribu ton.

Seiring transformasi strategi industrialisasi, liberalisasi perdagangan dan investasi di era 1990-an mulai berdampak negatif pada swasembada pangan, dan berpuncak pada krisis 1997. Seiring reformasi ekonomi yang didorong IMF, liberalisasi pasar pangan domestik masif dilakukan di era 2000-an. Impor pangan membanjir dan nyaris tak terbendung. Pada 1999, impor beras meroket, mencapai 4,75 juta ton.

Seiring reformasi ekonomi yang didorong IMF. Pada 1999, impor beras meroket, mencapai 4,75 juta ton.

pada 2009 impor 9 komoditas pangan utama hanya 10,32 juta ton senilai US\$ 3,63 miliar, maka satu dekade kemudian berlipat menjadi 24,77 juta ton senilai US\$ 9,06 miliar.

Pasca krisis pangan global 2008 dimana harga pangan melonjak dan stok pangan dunia merosot drastis, alih-alih memberi kesadaran tentang urgensi swasembada, impor pangan justru semakin meningkat. Bila pada 2009 impor 9 komoditas pangan utama hanya 10,32 juta ton senilai US\$ 3,63 miliar, maka satu dekade kemudian angka ini telah berlipat menjadi 24,77 juta ton senilai US\$ 9,06 miliar.



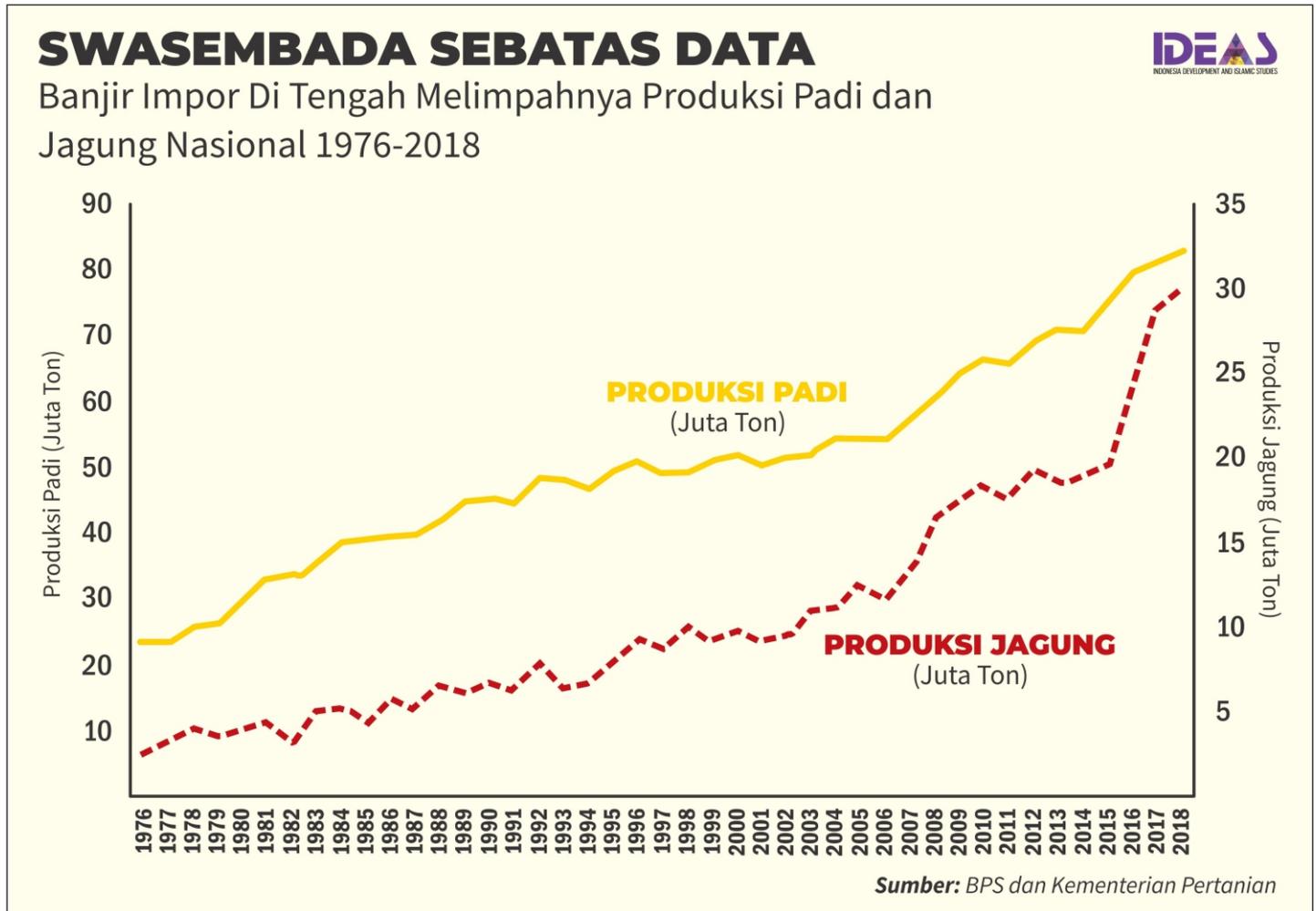
Ironi Swasembada Administrasi

Untuk formulasi kebijakan pangan yang efektif dan efisien, pemerintah mutlak membutuhkan sistem informasi pangan nasional yang akurat dan selalu dimutakhirkan. Data yang handal dan dapat diakses secara cepat ini antara lain tentang produksi, konsumsi, harga, ekspor-impor, kebutuhan pangan daerah dan status gizi penduduk lokal, hingga prakiraan iklim dan proyeksi pasokan.

Pada 2016 pemerintah telah mengklaim swasembada beras, namun sebatas swasembada administrasi. Berbekal data produksi padi 79,3 juta ton atau setara 45,5 juta ton beras, Kementerian Pertanian tidak mengeluarkan rekomendasi impor beras di sepanjang 2016. Namun ternyata izin impor tetap dikeluarkan Kementerian Perdagangan, dan pada 2016 impor beras tercatat 1,28 juta ton. Swasembada sebatas data ini terulang pada 2018. Dengan

Berbekal data produksi padi 79,3 juta ton, Kementerian Pertanian tidak mengeluarkan rekomendasi impor beras sepanjang 2016. Namun izin impor tetap dikeluarkan Kementerian Perdagangan, swasembada sebatas data ini terulang pada 2018.

basis luas lahan baku sawah 7,75 juta hektar, pemerintah memperkirakan produksi padi 2018 mencapai 83,04 juta ton, setara 47,62 juta ton beras. Namun di tahun tersebut, impor beras tercatat 2,25 juta ton.



Merespon kritik terhadap akurasi data pemerintah, BPS memperbaiki metode perkiraan produksi beras. Dengan basis luas lahan baku sawah terkini yang hanya 7,11 juta hektar, BPS merevisi perhitungan luas panen padi berdasarkan pengamatan yang objektif, yaitu metode KSA (kerangka sampel area), dan memperkirakan produksi padi 2018 hanya 56,54 juta ton, setara 32,42 juta ton beras. Namun dengan perkiraan konsumsi beras nasional 2018 sebesar 29,57 juta ton, maka seharusnya terdapat surplus 2,85 juta ton. Dengan kata lain, impor beras 2018 sebesar 2,25 juta ton tetap tidak dibutuhkan.

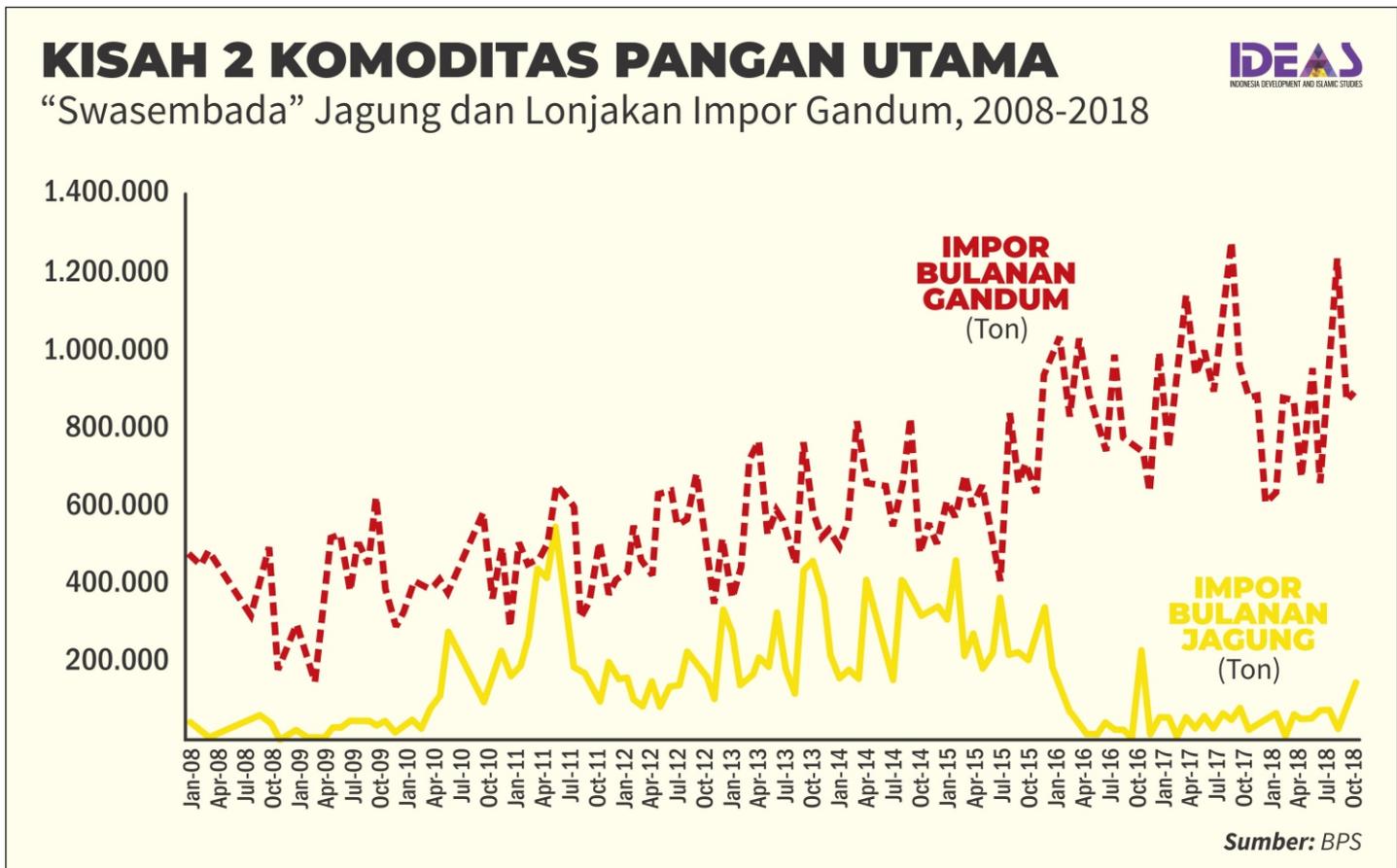
BPS memperkirakan produksi padi 2018 hanya 56,54 juta ton, setara 32,42 juta ton beras.

Ironi lain datang dari “swasembada” jagung. Berbeda dengan anomali impor beras yang melonjak tajam di tengah kenaikan produksi padi, impor jagung menurun tajam seiring kenaikan produksi jagung nasional. Bila pada 2014 impor jagung mencapai 3,25 juta ton, maka pada 2018 impor jagung turun drastis menjadi hanya 737 ribu ton. Hal ini selaras dengan data produksi jagung yang mengalami kenaikan signifikan dari 19 juta ton pada 2014 menjadi diperkirakan menembus 30 juta ton pada 2018.

... pada 2014 impor jagung mencapai 3,25 juta ton, turun drastis menjadi hanya 737 ribu ton di 2018. Selaras dengan data produksi jagung yang mengalami kenaikan signifikan.

... 2015 impor gandum mencapai 7,4 juta ton, pada 2016 angkanya melonjak menjadi 10,5 juta ton. Di saat yang sama, impor jagung menurun drastis dari 3,3 juta ton menjadi hanya 1,1 juta ton.

Namun keberhasilan swasembada jagung ini menyisakan pertanyaan besar, karena terjadi bersamaan dengan lonjakan impor gandum. Sejak Januari 2016, impor gandum melonjak tajam seiring kejatuhan impor jagung. Bila pada 2015 impor gandum baru mencapai 7,4 juta ton, pada 2016 angkanya melonjak menjadi 10,5 juta ton. Di saat yang sama, impor jagung menurun drastis dari 3,3 juta ton menjadi hanya 1,1 juta ton. Dengan konsumsi terigu nasional hanya setara 8 juta ton gandum per tahun, maka lonjakan impor gandum ini dipastikan terjadi karena permintaan untuk pakan ternak. Dengan kata lain, pakan ternak yang selama ini mengandalkan jagung beralih ke gandum. Turunnya impor jagung secara signifikan bukan karena prestasi produksi domestik, tetapi secara sederhana hanya beralih ke gandum.



Arah Kebijakan Pangan Nasional

... rendahnya hasil dari usaha pertanian sering berakhir dengan alih fungsi sumber daya, terutama lahan dan tenaga kerja.

Ancaman terbesar bagi kedaulatan pangan datang dari rendahnya kesejahteraan pelaku usahanya, terutama petani. Disinsentif ekonomi bahkan seringkali datang dari pemerintah, seperti kebijakan impor ditengah panen nasional. Sektor pertanian kini semakin tidak populer, semakin ditinggal oleh tenaga kerja muda dan talenta terbaik bangsa. Ketimpangan kepemilikan lahan dan struktur biaya produksi yang tidak efisien menjadi hambatan terbesar dalam mendorong usaha pertanian. Dengan rendahnya hasil dari usaha pertanian, maka tekanan kompetisi dari sektor lain untuk pemanfaatan sumber daya pertanian pangan, sering

berakhir dengan alih fungsi sumber daya, terutama lahan dan tenaga kerja. Di sisi lain, perubahan iklim, kejenuhan tanah akibat praktek bertani yang tidak ramah lingkungan, dan degradasi sumber daya air, telah semakin menurunkan produktivitas lahan pertanian pangan.

Sementara itu di sisi permintaan pangan, dibutuhkan penganekaragaman pangan lokal dan gaya hidup sehat. Atas nama swasembada, budaya pangan lokal yang sesuai dengan karakteristik genetika penduduk lokal dan daya dukung alam setempat, banyak diabaikan, dan kini nyaris hancur di era perdagangan bebas dan serbuan budaya pangan asing. Sebagai misal, pola pangan utama berbasis sagu, umbi-umbian dan jagung di Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan Nias kini telah berganti dengan pola pangan berbasis beras, bahkan gandum.

Indonesia kini telah bertransformasi menjadi importir gandum terbesar di dunia. Pada 1970-an, impor gandum hanya di kisaran 500 ribu ton, kemudian melonjak di kisaran 3 juta ton pada 1990-an, dan kini telah menembus 10 juta ton. Intrusi budaya pangan asing berbasis gandum, kentang dan daging (westernization of diet), selain menggerus kemandirian pangan dan mengancam budaya pangan lokal, juga tidak sehat secara gizi. Gandum yang merupakan bahan baku terigu adalah komponen utama makanan olahan seperti mie, roti, biskuit, aneka kue hingga makanan gorengan.

Atas nama swasembada ... pola pangan utama berbasis sagu, umbi-umbian dan jagung di Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan Nias kini telah berganti dengan pola pangan berbasis beras, bahkan gandum.

Pada 1970-an, impor gandum hanya di kisaran 500 ribu ton, kemudian melonjak di kisaran 3 juta ton pada 1990-an, dan kini telah menembus 10 juta ton.

APBN untuk Rakyat

Yusuf Wibisono

Mimpi kedaulatan pangan telah dimulai sejak awal orde baru. Revolusi hijau yang masif di era 1970-an, yang ditopang pendapatan oil bonanza, mampu mengantarkan Indonesia pada swasembada pangan di pertengahan 1980-an. Namun seiring transformasi industrialisasi menuju strategi promosi ekspor, kemandirian pangan nasional mulai tergerus pada 1990-an, yang berpuncak pada krisis ekonomi 1997.

Kehadiran IMF yang mendorong liberalisasi pasar pangan domestik telah menciptakan erosi kredibilitas kebijakan karena IMF dipandang sebagai kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan dan agenda sendiri. Pelaksanaan program penyesuaian struktural dan liberalisasi perdagangan ditengah kemampuan sektor pertanian domestik yang lemah dalam alih teknologi, kesulitan untuk memasuki global supply chain, dan daya saing yang lemah di pasar global, telah meruntuhkan banyak usaha pertanian rakyat.

Reformasi ekonomi yang dikaitkan IMF sebagai prasyarat utang (conditionalities) membuat liberalisasi perdagangan pangan nampak menjadi bentuk baru kolonialisme dan mengancam nasionalisme ekonomi. Liberalisasi pasar pangan telah mendorong impor pangan secara berlebihan, termasuk melalui jalur illegal, sehingga secara jelas merugikan petani.

Kedaulatan Pangan

isu ketahanan pangan hanyalah isu kenaikan produksi pangan untuk memberi makan kelompok miskin

Dibawah rezim pangan global, isu ketahanan pangan hanyalah isu kenaikan produksi pangan untuk memberi makan kelompok miskin, sehingga strategi yang ditempuh berfokus pada pola produksi pangan termurah dan paling efisien. Negara miskin dapat meraih manfaat optimal dari liberalisasi pasar pangan dengan berfokus pada produksi tanaman yang paling tinggi permintaannya di pasar global dengan di saat yang sama mendapat keuntungan dari harga pangan impor yang murah.

Menggenjot produktivitas pertanian akan mengizinkan rumah tangga miskin pedesaan untuk memproduksi pangan yang berdaya saing tinggi di pasar global. Karena produktivitas pertanian menjadi strategi utama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, maka penekanan diberikan pada tanaman dan ternak bernilai tinggi di pasar, beralih dari tanaman pangan pokok ke tanaman perkebunan bernilai tinggi, dari produksi primer ke rantai produksi pangan keseluruhan. Selain membuka pasar domestik, maka dibutuhkan pula liberalisasi investasi asing dan impor barang modal untuk modernisasi sektor pertanian. Pasar input yang berfungsi baik, termasuk tanah, akan memastikan

IMPOR PANGAN DAN KAPITAL GLOBAL

Kedaulatan Pangan dan Hegemoni IMF, 1997-2003

1 Lol, 31 Oktober 1997

- Penurunan tarif impor dari 0-40% menjadi 0-10% sampai 2003.
- Sektor terbuka untuk investasi asing akan disederhanakan dan diperluas.

2 Supplementary Lol, 15 Januari 1998

- Penurunan tarif impor, terutama produk makanan maksimum 5%.
 - Liberalisasi investasi asing, perkebunan kelapa sawit pada Februari, perdagangan dan ritel pada Maret.
- Deregulasi perdagangan domestik semen, kertas, kayu lapis, dan produk pertanian.
- Monopoli BULOG dibatasi hanya untuk komoditas beras.

3 Lol, 29 Juli 1998

- Penurunan tarif produk pertanian non-makanan maksimum 10%.
 - Menyederhanakan sektor tertutup untuk investasi asing.
- Kompetisi bebas untuk impor dan perdagangan terigu, kedelai, bawang putih, tepung terigu dan gula.

4 Supplementary Lol, 11 September 1998

- Menjamin ketersediaan beras.
- Menghapus monopoli BULOG pada terigu, gula dan kedelai.

5 Lol, 20 Januari 2000

- Mempertahankan rezim perdagangan bebas dengan menerapkan struktur tarif tiga tingkat (0, 5 dan 10%) untuk semua komoditas dan menghapus semua hambatan non-tarif.
- Menjamin ketersediaan pangan dengan liberalisasi pasar beras.

6 Lol, 13 Desember 2001

- Komitmen liberalisasi neraca modal dan rezim perdagangan.

7 Lol, 18 Maret 2003

- Mempertahankan rezim perdagangan terbuka dan liberal, serta menghormati komitmen AFTA dan WTO.

Memorandum Of Economy and Financial Policies (MEFP): Reformasi Struktural terkait Pangan

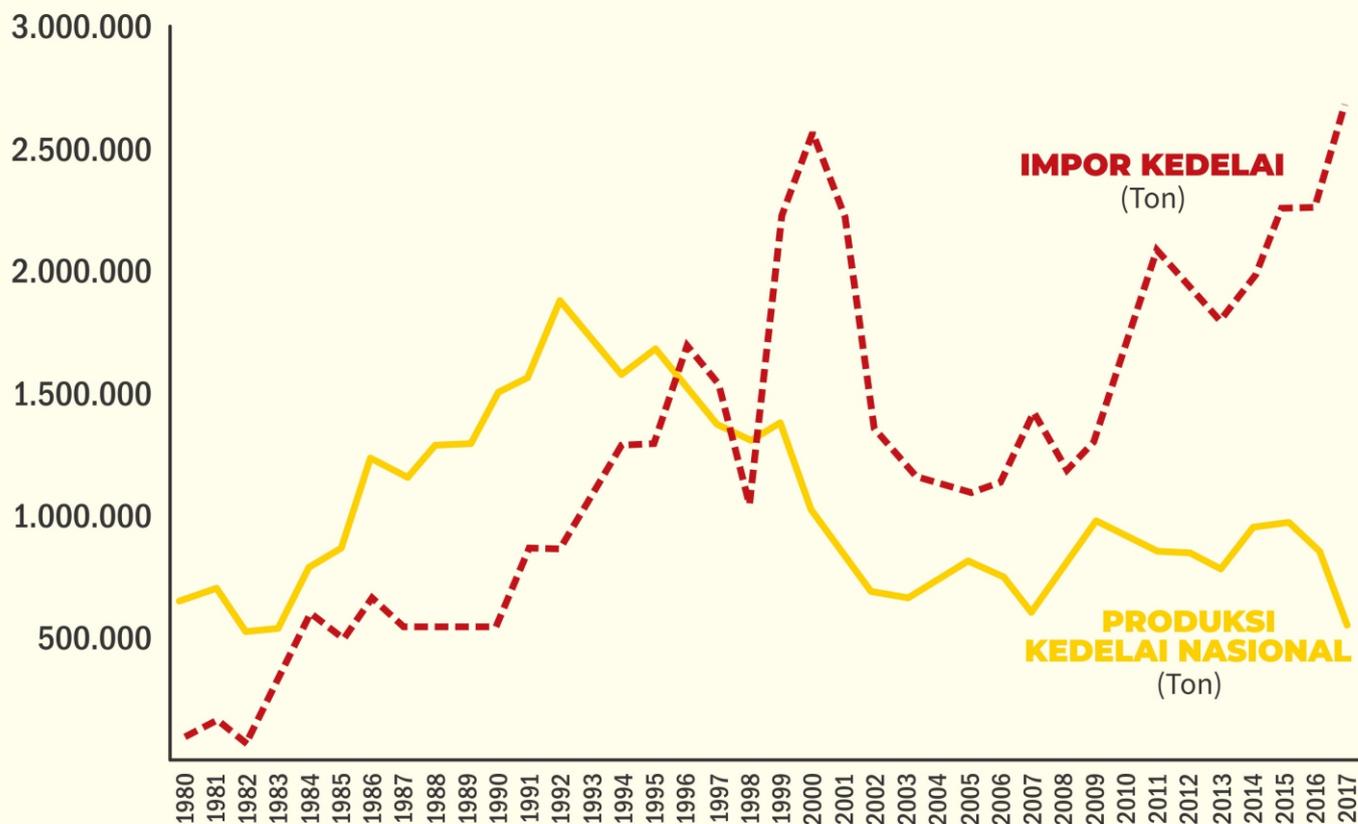
Letter of Intent

transfer input pertanian ke pelaku usaha tani paling produktif, termasuk perusahaan multinasional.

GLOBALISASI DAN INVOLUSI PERTANIAN



Hancurnya Produksi Kedelai Nasional, 1980-2017



Sumber: BPS dan Kementerian Pertanian

Sepanjang 1999 - 2001, impor kedelai melonjak dua kali lipat, menembus 2 juta ton. Di saat yang sama, produksi kedelai domestik jatuh drastis ... hingga kini

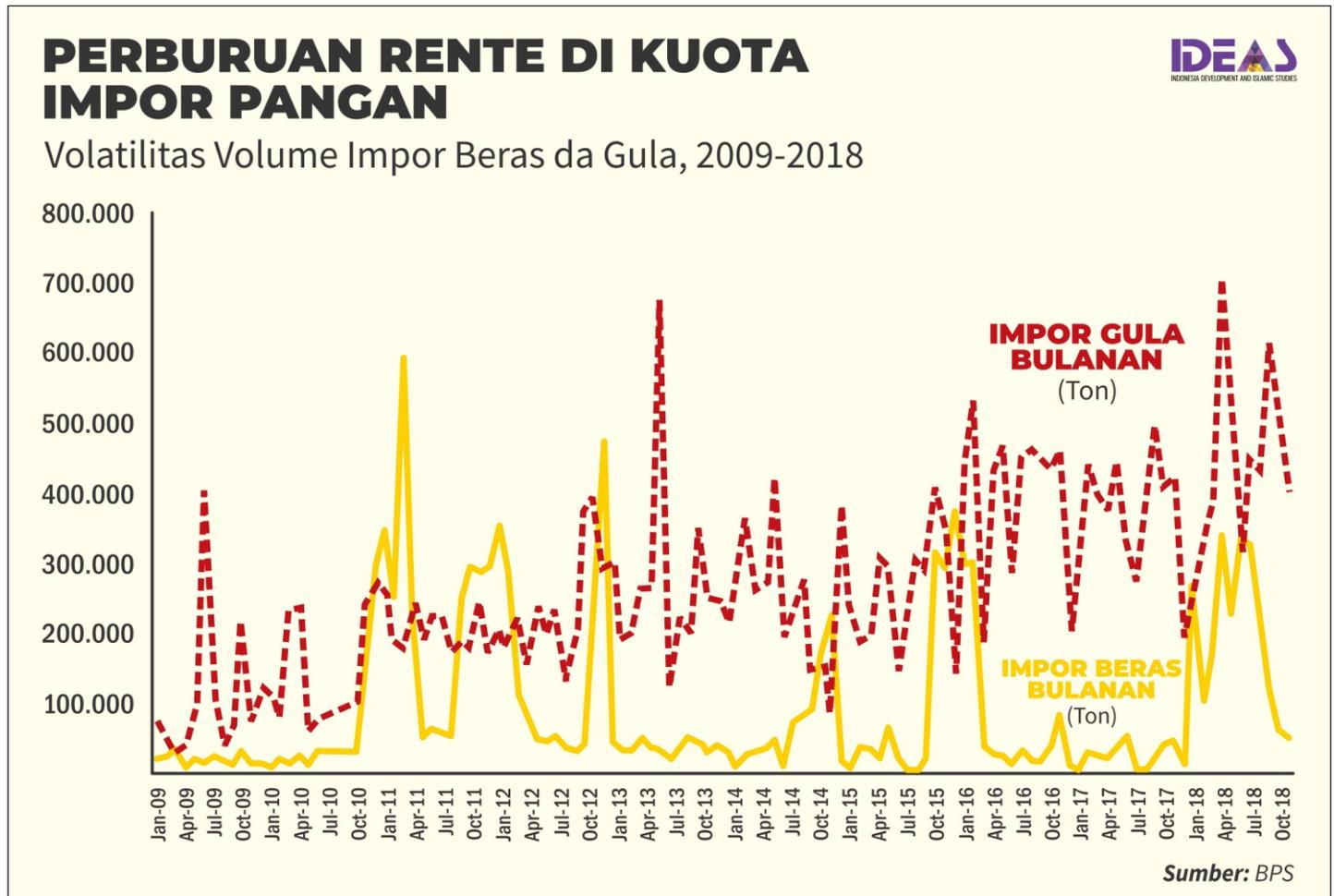
Dengan paradigma rezim pangan global ini, liberalisasi pasar kedelai dibuka atas dorongan IMF pasca krisis 1997. Sepanjang 1999 - 2001, impor kedelai melonjak dua kali lipat, menembus 2 juta ton. Di saat yang sama, produksi kedelai domestik jatuh drastis dan tidak pernah mampu bangkit kembali hingga kini. Terakhir, pada 2017, produksi kedelai nasional hanya 539 ribu ton sedangkan impor kedelai mencapai 2,7 juta ton. Target swasembada kedelai pada 2020 terasa menjadi utopia.

... kerasnya isu mafia impor pangan, merupakan kegagalan kebijakan dan menjadi bentuk kegagalan kedaulatan pangan yang paling jelas.

Kedaulatan politik pangan tidak hanya ditentukan oleh independensi formulasi kebijakan pangan untuk memenuhi hak pangan setiap warga negara, namun juga kredibilitas proses pembuatan kebijakan yang bebas dari pengaruh *vested interest groups*. Rendahnya efektivitas dan efisiensi kebijakan, yang antara lain ditandai dengan kerasnya isu mafia impor pangan, merupakan kegagalan kebijakan dan menjadi bentuk kegagalan kedaulatan pangan yang paling jelas.

Dengan selisih harga yang lebar antara harga domestik dan internasional, terdapat motivasi yang kuat untuk melakukan impor pangan untuk keuntungan besar secara cepat. Di sepanjang 2009 -

2018, pola impor bulanan beras dan gula menunjukkan ketidakteraturan yang tinggi. Volatilitas yang sangat tinggi dalam volume impor beras dan gula di satu sisi dapat dimaknai sebagai bentuk dari buruknya perencanaan dan formulasi kebijakan pangan. Namun di sisi lain, hal ini dapat pula dimaknai sebagai kerasnya intervensi *vested interest groups* untuk meraih keuntungan besar secara cepat dari impor.



Kerentanan Impor Pangan

Tujuan akhir dari kedaulatan pangan adalah menjamin hak pangan setiap warga negara. Untuk mencapai itu maka, kedaulatan pangan menuntut independensi negara dalam formulasi kebijakan pangan nasional. Karena bertujuan akhir menjamin hak pangan setiap penduduk, maka kedaulatan pangan harus menjaga sistem produksi pangan dan budaya pangan lokal. Dalam kedaulatan pangan maka negara berdaulat dan mandiri dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam (diversifikasi pangan) sesuai sumber daya dan kearifan lokal.

Pendekatan liberal dalam kebijakan pangan menitikberatkan pada peningkatan produksi pangan dan akses ke pasar pangan global, dengan memberi prioritas pada *"food enterprises"* untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas pertanian. Integrasi dengan pasar

Untuk menjamin hak pangan setiap penduduk, maka kedaulatan pangan harus menjaga sistem produksi pangan dan budaya pangan lokal.

global, melalui impor dan ekspor pangan secara masif, adalah keharusan menuju kesejahteraan. Namun industrialisasi pedesaan dan intensifikasi pertanian dengan revolusi hijau, telah terbukti di banyak negara menimbulkan dampak negatif yang dramatis pada tanah, air dan keamanan pangan.

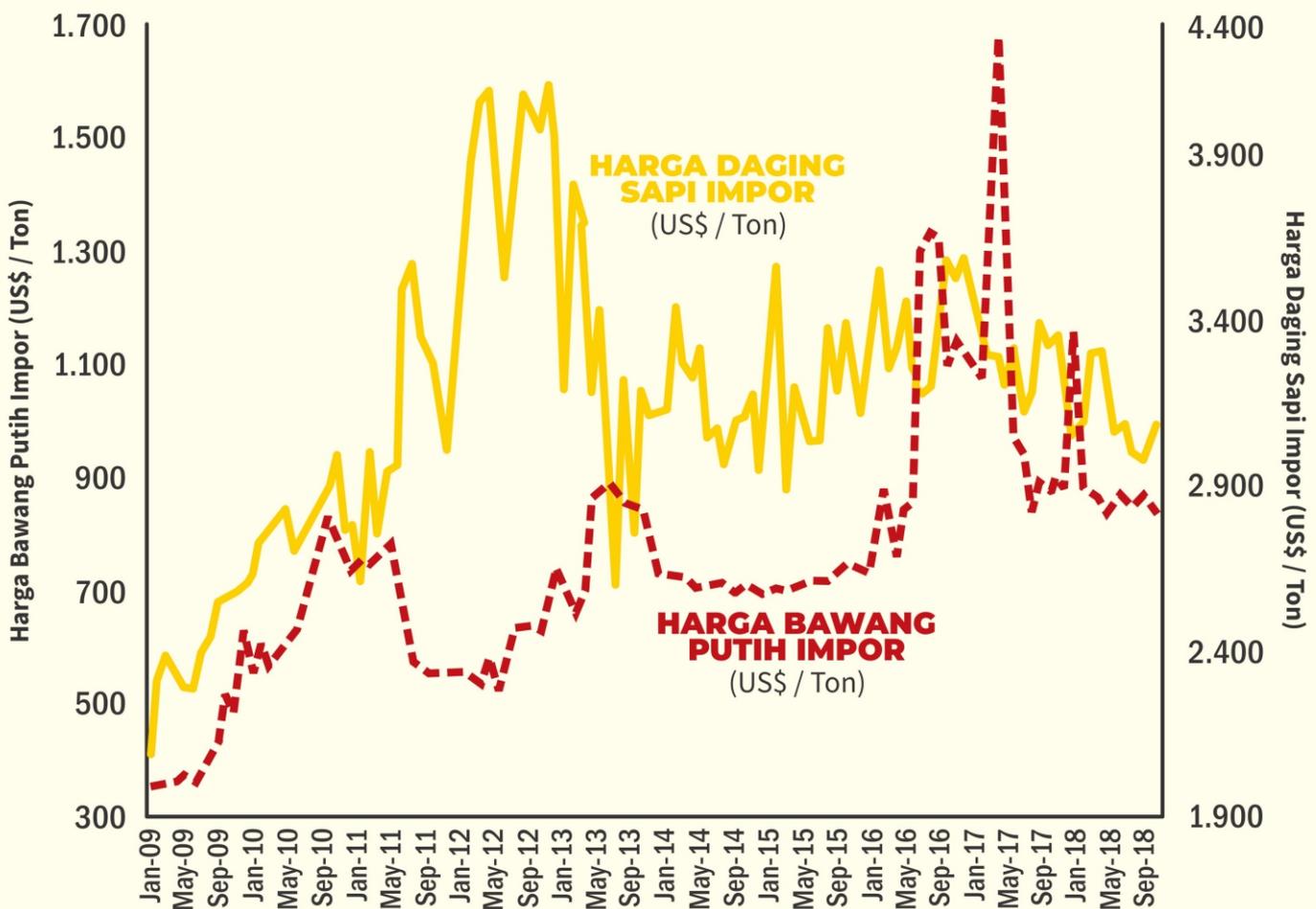
... pasar pangan global memunculkan kerentanan yang tinggi pada ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Sebaliknya, gerakan pangan berkelanjutan yang dekat dengan konsep ketahanan dan kemandirian pangan, mempromosikan pengembangan lumbung pangan lokal, usaha pertanian pangan berbasis keluarga (*family farming*), serta akses ke pangan segar dan terjangkau, dengan memberi penekanan pada keterkaitan desa-kota untuk kelancaran arus distribusi pangan. Dibawah pendekatan ini, bergantung pada pasar pangan global memunculkan kerentanan yang tinggi pada ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

KEDAULATAN PANGAN DI UJUNG HARGA GLOBAL

IDEAS
INDONESIA DEVELOPMENT AND ISLAMIC STUDIES

Lonjakan Harga Daging dan Bawang Putih Impor, 2009-2018



Sumber: Diolah dari BPS

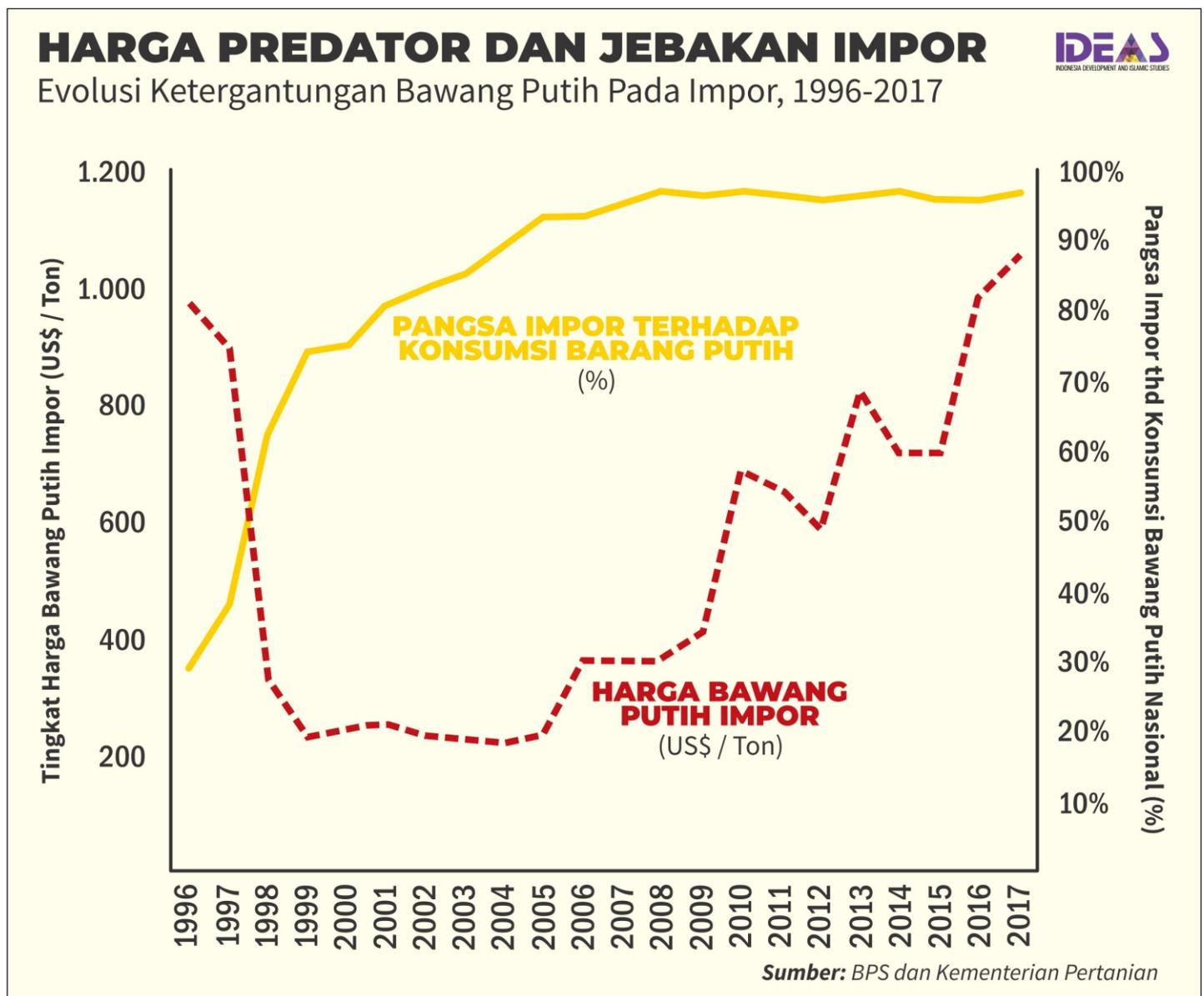
Kerentanan terbesar datang dari ketidakpastian pasokan dan harga pangan internasional. Karakteristik sektor pertanian yang sangat bergantung pada kondisi alam, siklus produksi dengan rentang

waktu yang panjang, dan memiliki pola surplus dan defisit output yang akut, membuat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran sering terjadi, bahkan sering terjadi secara tidak terduga sebagaimana kasus krisis pangan global di awal 2008, yang pada gilirannya kemudian menciptakan fluktuasi yang tajam pada harga produk pertanian. Kenaikan tajam harga pangan dunia pada 2008 didorong terutama oleh pengembangan energi terbarukan (*biofuels*).

Kenaikan tajam harga pangan dunia pada 2008 didorong oleh pengembangan energi terbarukan (*biofuels*).

Ketergantungan tinggi pada impor seringkali menimbulkan gejolak harga di perekonomian domestik melalui kenaikan harga pangan impor (*imported inflation*). Gejolak harga daging sapi misalnya, secara jelas berkorelasi dengan tingginya harga daging sapi impor. Sepanjang 2009 - 2018, harga daging sapi impor telah meningkat dua kali lipat, dimana pada puncak tertinggi harga meningkat hingga tiga kali lipat.

Sepanjang 2009 - 2018, harga daging sapi impor telah meningkat hingga tiga kali lipat.



Kasus impor bawang putih bahkan memberi indikasi bahwa harga pangan global yang murah bertujuan menghancurkan produsen

... ketergantungan pada impor bawang putih melonjak drastis dari 38 persen pada 1997 menjadi 93 persen pada 2005.

domestik. Sebelum krisis 1997, harga bawang putih impor berada di kisaran US\$ 1.000 per ton. Namun pasca 1997, harga bawang putih impor jatuh secara drastis hingga 2005. Seiring itu, ketergantungan pada impor bawang putih melonjak drastis dari 38 persen pada 1997 menjadi 93 persen pada 2005. Sejak itu, di atas kehancuran petani bawang putih domestik, 95 persen kebutuhan bawang putih nasional dipenuhi dari impor, namun dengan harga bawang putih impor yang terus naik secara progresif.

Dengan demikian, prinsip dasar impor pangan adalah pengecualian. Impor pangan hanya boleh dilakukan ketika produksi dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Impor tidak boleh mengancam keberlanjutan usaha tani lokal dan peningkatan produksi pangan nasional.

Menuju Kemandirian Pangan Nasional

... tujuan akhir kebijakan pangan nasional adalah ketahanan pangan dan gizi setiap warga negara.

Swasembada merupakan cara pengadaan pangan nasional yang paling aman dari resiko guncangan pasar dan lonjakan harga pangan global maupun ancaman politik pangan negara lain. Swasembada pangan esensial untuk kedaulatan politik pangan dan kelestarian budaya pangan nasional. Namun demikian, swasembada pangan adalah tujuan antara, tujuan akhir kebijakan pangan nasional adalah ketahanan pangan dan gizi setiap warga negara.

... rantai pasokan pangan yang panjang membuat keinginan melindungi konsumen sering berakhir dengan tertekannya harga di tingkat petani.

Setiap upaya tata niaga pangan harus bertujuan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, manajemen cadangan pangan serta penciptaan iklim usaha yang sehat. Stabilisasi pasokan dan harga pangan berwajah ganda, di satu sisi bertujuan melindungi pendapatan petani, namun disisi lain ingin menjaga daya beli konsumen. Dengan kemampuan anggaran yang terbatas dan manajemen cadangan pangan yang lemah, stabilisasi pasokan pangan di Indonesia sering tidak efektif. Di sisi lain, rantai pasokan pangan yang panjang membuat keinginan melindungi konsumen sering berakhir dengan tertekannya harga di tingkat petani.

Produsen dan konsumen pangan tidak harus dipertentangkan, mereka dapat membentuk koalisi produsen-konsumen untuk kepentingan bersama. Sebagai misal, koalisi terbentuk ketika konsumen dilindungi dari produk tidak aman dan berkualitas rendah, dan disaat yang sama petani diberi insentif dengan jaminan perlindungan dari masuknya produk impor.



Jl. Legoso Raya No.70, Pisangan, Ciputat Timur
Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia - 15419
Phone: +62 21 22795885 (office)



**Indonesia Development
and Islamic Studies**



@ideas_riset



@ideas.riset



www.ideas.or.id